

PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DI  
 PERGURUAN TINGGI NEGERI (STUDI PADA POLITEKNIK NEGERI DI  
 KALIMANTAN BARAT)

Oleh

Elsa Sari Yuliana<sup>1)</sup>, Sari Zawitri<sup>2)</sup> & Bob Mustafa<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak

Email: <sup>1</sup>[elsa\\_sariyuliana@yahoo.com](mailto:elsa_sariyuliana@yahoo.com)

**Abstrak**

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa dari tahun 2006 hingga Agustus 2016, tercatat sedikitnya 37 kasus korupsi yang terkait dengan perguruan tinggi dengan 12 pola korupsi di perguruan tinggi, diantaranya: korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi modus yang paling banyak digunakan, korupsi dana penelitian dan dana beasiswa mahasiswa, praktik korupsi dengan menggunakan pola suap juga umum ditemukan, korupsi dana hibah atau CSR, korupsi anggaran internal perguruan tinggi, korupsi penjualan aset milik perguruan tinggi, dan korupsi dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa (ICW: 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, budaya etis manajemen dan mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap fraud di perguruan tinggi negeri. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pegawai di Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Negeri Ketapang dan Politeknik Negeri Sambas dengan metode penyebaran kuesioner purposive sampling. Pegawai terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel kesesuaian kompensasi yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (fraud) pada pegawai PTN di Kalbar. Sedangkan variabel-variabel lainnya tidak berpengaruh.

**Kata Kunci: Fraud & Persepsi Pegawai**

**PENDAHULUAN**

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2017), menyebutkan bahwa fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Fraud tidak selalu dikonotasikan dengan perbuatan kriminal. Fraud yang bukan perbuatan kriminal masuk pada kategori risiko operasional, sedangkan fraud yang merupakan perbuatan kriminal masuk kategori risiko ilegal. Perbuatan kriminal didefinisikan sebagai an intentional at that violates the Criminal Law under which no legal excuse applies. Sementara

itu fraud didefinisikan sebagai any behavior by which one person gains or intend to gain a dishonest advantage over another. Perbuatan fraud dapat dikatakan sebagai kriminal apabila niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak jujur tersebut juga sekaligus melanggar ketentuan hukum, misalnya korupsi atau penggelapan pajak. (Tampubolon, 2005).

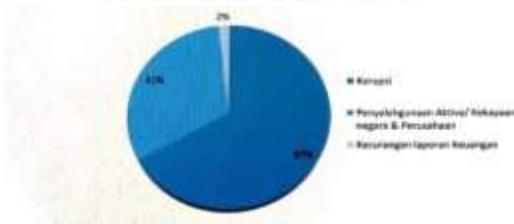
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa dari tahun 2006 hingga Agustus 2016, tercatat sedikitnya 37 kasus korupsi yang terkait dengan perguruan tinggi dengan 12 pola korupsi di perguruan tinggi, diantaranya: korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menjadi modus yang paling banyak digunakan, korupsi dana penelitian dan dana beasiswa mahasiswa, praktik korupsi dengan menggunakan pola suap juga umum ditemukan,

korupsi dana hibah atau CSR, korupsi anggaran internal perguruan tinggi, korupsi penjualan aset milik perguruan tinggi, dan korupsi dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa (ICW: 2016).

Albrecht (2012) menyebutkan bahwa hal-hal yang menyebabkan perilaku kecurangan adalah tekanan (pressure), rasionalisasi (rationalize), dan kesempatan (opportunity). Ketiga komponen ini biasa juga disebut fraud triangle. Teori ini hingga kini telah mengalami evolusi yang cukup signifikan dengan penambahan unsur kemampuan (capability) dalam teori fraud diamond dan penambahan unsur arogansi (arrogance) dalam teori fraud pentagon.

Fraud secara umum dibagi dalam tiga bentuk yaitu korupsi, penyalahgunaan aktiva/kekayaan perusahaan/ Negara, dan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan ACFE (2017) fraud yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah:

**Gambar 1.1. Fraud Yang Paling Banyak Ditemukan di Indonesia**



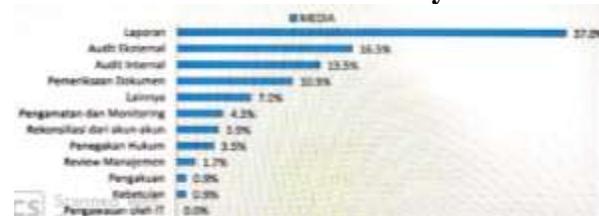
Sumber: ACFE (2017)

Dalam banyak hasil studi menunjukkan bahwa dampak korupsi di perguruan tinggi sangat membahayakan budaya bangsa, karena praktik korupsi di insitusi pendidikan berdampak langsung pada pembentukan karakter sumber daya manusia yang cenderung koruptif. Berkaitan dengan hal tersebut, Heyneman (2007) dalam hasil risetnya menemukan praktik korupsi di perguruan tinggi berdampak langsung pada terbentuknya pemahaman mahasiswa bahwa masa depan lapangan kerja dan karir mereka dapat dicapai dengan mudah melalui suap dan menipu.

Secara umum, praktik korupsi di perguruan tinggi dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, korupsi yang melibatkan mahasiswa secara langsung sebagai pelaku korupsi, di mana mahasiswa didorong oleh sistem perguruan tinggi untuk melakukan tindakan korupsi. Kedua, korupsi yang tidak melibatkan mahasiswa, di mana dalam konteks ini tindakan korupsi di perguruan tinggi tidak melibatkan mahasiswa secara langsung namun praktik korupsi berlangsung dalam urusan tata kelola perguruan tinggi (Denisova & Schmidt, 2017).

Deteksi awal penemuan fraud (ACFE: 2017) paling banyak teridentifikasi dari media laporan, audit eksternal, audit internal, dan bentuk lainnya seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 1. Media Ditemukannya Fraud**



Sumber: ACFE (2017)

Laporan disini merupakan informasi dari pihak internal yaitu karyawan perusahaan tersebut.

**Gambar 2. Sumber Penemuan Fraud**



Sumber: ACFE (2017)

## LANDASAN TEORI

### Persepsi

Kata persepsi menurut KBBI Daring (2019) bermakna 1) tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; 2) proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Sedangkan menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah: a) proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian

objektif dengan bantuan indera, b) kesadaran dari proses-proses organis, c) *titchener/* satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, c) variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang, d) kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Chaplin, 2006).

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persepsi dalam penelitian ini adalah tanggapan seseorang berupa kesadaran intuitif mengenai objek atau kejadian objektif yang terjadi disekitarnya.

### **Fraud**

United Nations Development Program (UNDP, 2015) mendefinisikan *fraud* sebagai, "*Fraud is a knowing misrepresentation of the truth or a concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment.*" Hal ini sejalan dengan pengertian *fraud* menurut Oxford Dictionary yaitu penipuan kriminal atau kesalahan yang dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan finansial atau pribadi.

Busines Dictionary mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan atau jalan penipuan, penyembunyian yang disengaja, kelalaian, atau penyimpangan kebenaran, untuk (1) mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau tidak adil, (2) mendorong pihak lain untuk mengambil bagian dengan barang berharga atau menyerahkan hak hukum, atau (3) menimbulkan cedera dalam beberapa cara. Kecurangan yang disengaja adalah pelanggaran pidana yang menuntut hukuman berat, dan penuntutan serta hukumannya (seperti pembunuhan) tidak terikat oleh undang-undang pembatasan. Namun ketidakmampuan atau kelalaian dalam mengelola bisnis atau bahkan

pemborosan aset perusahaan secara sembrono (dengan berspekulasi di pasar saham, misalnya) biasanya tidak merupakan penipuan.

Menurut Sihombing (2014) *fraud* merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, tahu dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya: sumber daya perusahaan dan negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut.

### **Teori Fraud Triangle**

Cressey dalam Tuanakotta (2010) menyebutkan terdapat tiga elemen penyebab terjadinya kecurangan yang disebut dengan *triangle*, ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pressure* (tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *Fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Faktor non keuangan tersebut meliputi; kedudukan, kegagalan pribadi, kegagalan bisnis, keterpurukan dalam kesendirian, kebiasaan buruk, dan kekesalan/kebencian.
2. *Opportunity* (kesempatan), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang.
3. *Rationalization* (rasionalisasi) yaitu mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Rasionalisasi diperlukan untuk melawan hukum demi mempertahankan jati diri pelaku kecurangan.

### **Teori Fraud Diamond**

*Fraud diamond* merupakan pengembangan dari *fraud triangle* yang telah ada sebelumnya. *Fraud diamond* dipaparkan oleh Wolf dan Hermanson pada akhir tahun 2004. Wolf dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa banyak kecurangan tidak akan terjadi tanpa adanya orang yang tepat yang memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan. Posisi seseorang atau fungsi seseorang dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk berbuat atau memanfaatkan kesempatan agar kecurangan tidak tersedia untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kemampuan (*capability*) dapat dijadikan salah satu faktor untuk mengukur seberapa besar daya dan kapasitas dari seseorang untuk melakukan *fraud* di lingkungan organisasi.

Adapun sifat-sifat terkait elemen *capability* yang sangat penting dalam pribadi perilaku kecurangan menurut Wolfe dan Hermanson (2004), yaitu:

#### a) *Positioning*

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi atau lingkungan tertentu.

#### b) *Intelligence and Creativity*

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mampu mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses kewenangan untuk keuntungan terbesar.

#### c) *Convidence/ Ego*

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum

termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil disemua bidang, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (narsisme). Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini percaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka.

#### d) *Coercion*

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk bersama melakukan penipuan atau untuk mengabaikan penipuan tersebut.

#### e) *Deceit*

Penipuan yang sukses membutuhkan rangkaian kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong yang meyakinkan, serta harus mengaitkan seluruh cerita.

#### f) *Stress*

Individu harus mampu mengendalikan stres, karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaga kecurangan tersebut tetap tersembunyi atau tidak diketahui orang, sangat memungkinkan timbul stres.

### **Teori Fraud Pentagon**

Teori terbaru yang mengupas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu *fraud* adalah teori yang dikemukakan oleh Crowe Howarth pada 2011. Teori ini kemudian dikenal dengan nama *fraud pentagon* atau biasa juga *Crowe's fraud pentagon theory*, karena menambahkan 1 (satu) faktor lagi penyebab *fraud* dari *fraud diamond*, atau 2 (dua) faktor jika dari teori *fraud Cressey*. Penambahan ini

adalah kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*).

Crowe, 2011 menjelaskan bahwa arogansi merupakan sifat superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya.

*Frequent number of CEO's picture* adalah jumlah penggambaran seorang CEO dalam suatu perusahaan dengan menampilkan *display picture* ataupun profil, prestasi, foto, ataupun informasi lainnya mengenai *track of record* CEO yang dipaparkan secara berulang-ulang dalam laporan tahunan perusahaan (Crowe, 2011 dalam Yusof, Khair & Simon, 2015).

Seorang CEO cenderung lebih ingin menunjukkan ke publik tentang kekuasaan dan karir yang dimilikinya di dalam perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak ingin kehilangan status atau posisi yang dimiliki dalam lingkup manajemen perusahaan (atau merasa tidak dianggap).

*Arrogance* dapat memicu terjadinya *financial statement fraud* dengan cara menggunakan dan memanfaatkan wewenang yang dimiliki. *Control internal system* apapun tidak bisa membatasi tindakan dan perilaku seorang CEO karena kekuasaan yang dimiliki. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Simon et al (2015) dan Tessa dan Harto (2016) yang menemukan hasil bahwa *frequent number of CEO's picture* berhubungan dengan arogansi yang mempengaruhi tindakan *financial statement fraud*.

### **Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Variabel Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Maya Aresteria (2018) dengan judul Peran Audit Internal Dalam Pencegahan *Fraud* di Perguruan Tinggi: *Literature Review*. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem internal control yang dibangun pihak perguruan tinggi, yang terdiri dari dewan eksekutif, komite audit, serta internal audit diharapkan dapat

menanggulangi penyelewengan (*fraud*) yang mungkin terjadi dalam pengelolaan baik di bidang akademik dan non akademik. Internal audit merupakan garis terdepan dalam pelaksanaan *internal control* suatu perguruan tinggi dalam mengawasi jalannya sistem pengelolaan perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelaporan yang dapat diandalkan serta mencegah terjadinya tindakan penyelewengan (*fraud*). Kompetensi dari internal auditor juga sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya *fraud* di perguruan tinggi.

Ika Ristianingsih (2017) dalam penelitiannya yang berjudul, Telaah Konsep *Fraud Diamond Theory* Dalam Mendeteksi Perilaku *Fraud* di Perguruan Tinggi, memperoleh hasil bahwa keempat elemen *fraud diamond* tidak dapat diteliti secara langsung, oleh karena itu diperlukan proksi-proksi untuk mengukurnya. Konsep *Fraud Diamond Theory* yaitu tekanan (*pressure*) yang diproksikan dengan variabel kepuasan kompensasi, keadilan organisasi dan tekanan situasional berupa otoritas atasan; variabel kesempatan (*opportunity*) yang diproksikan dengan variabel keefektifan pengendalian internal, penegakan hukum/ aturan, dan asimetri informasi; variabel rasionalisasi (*rationalization*) yang diproksikan dengan variabel budaya organisasi dan komitmen organisasi; serta variabel kemampuan (*capability*) yang diproksikan dengan posisi dalam pekerjaan, level penalaran moral, dan kompetensi.

Anik Fatun Najahningrum (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud*: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY, mendapatkan hasil pengaruh negatif antara penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, keadilan distributif, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Dhermawati Putri Mustikasari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Persepsi Pegawai Dinas Se-Kabupaten Batang Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (*Fraud*) menemukan hasil yang menunjukkan pengaruh negatif antara penegakan hukum/ peraturan dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara budaya manajemen dengan *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah riset kuantitatif dengan teknik analisa deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan keadaan sebenarnya tentang objek yang teliti yaitu persepsi pegawai terhadap faktor penyebab terjadinya *fraud* di perguruan tinggi negeri.

Untuk menjawab rumusan masalah maka penulis dengan pertimbangan penggunaan data yang mutakhir penelitian ini menggunakan populasi responden pegawai politeknik negeri di Kalimantan Barat.

Teknik pengambilan sampel pegawai politeknik negeri akan menggunakan metode random yakni pemilihan sampel dari populasi tidak berdasarkan kriteria tertentu, dengan kata lain secara acak (Jogiyanto: 2007).

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif. Menurut Umar (2008: 105), analisis deskriptif diperlakukan pada variabel-variabel penelitian, tetapi sifatnya sendiri, tidak dikaitkan dengan variabel lain. Berdasarkan variabel tersebut, analisis dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai banyak hal. Sejalan dengan pendapat Umar, Jogiyanto (2007: 163) menjabarkan statistik deskriptif sebagai statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya.

Data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan pada penelitian ini kemudian akan dianalisa menggunakan SPSS dengan pengujian yang akan dilakukan berupa, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Kemudian hasil pengujian akan dijabarkan secara deskriptif sehingga dapat diperoleh informasi yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun alat uji SPSS yang digunakan adalah IBM SPSS versi 22.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan di Perguruan Tinggi Negeri di Kalbar

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) merupakan salah satu bagian dari organisasi yang mengelola dana masyarakat. Sebagai organisasi publik seharusnya PTN mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Proses pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan secara transparan, karena hal tersebut berkaitan dengan kepentingan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu saja kegiatan operasional harus bebas dari tindakan kecurangan dalam bentuk apapun. Maka, semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis pertama (H1) dapat

dilihat bahwa Penegakan Peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada PTN di Kalbar dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,179 lebih dari 0,05. Sehingga kesimpulannya H1 ditolak. Hal ini dapat menggambarkan bahwa tindak kecurangan dapat terjadi meskipun peraturan telah dibuat dan dijalankan karena kecurangan dapat dilakukan secara sistematis dan terselubung.

### **Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan di Perguruan Tinggi Negeri di Kalbar**

Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis kedua (H2) dapat dilihat bahwa Keefektifan Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada PTN di Kalbar dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,419 lebih dari 0,05. Sehingga kesimpulannya H2 ditolak. Hal ini dapat menunjukkan bukti bahwa meskipun pengendalian internal telah dilakukan secara efektif, *fraud* dapat terjadi sebab kecenderungan kecurangan atau *fraud* dapat dilakukan secara sistematis dan terselubung.

### **Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan di Perguruan Tinggi Negeri di Kalbar**

Asimetri informasi merupakan kondisi yang mana pihak didalam atau pengelola perusahaan publik dalam hal ini PTN mengetahui informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar atau pihak

pengguna informasi selain pengelola. Dalam lingkup entitas perusahaan publik, yang menjadi pihak pengguna informasi merupakan masyarakat. Karena pihak PTN merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat. Jika kondisi tersebut terjadi, maka akan membuka peluang bagi pihak yang mengelola keuangan untuk melakukan kecurangan.

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis ketiga (H3) dapat dilihat bahwa Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada PTN di Kalbar dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,667 lebih dari 0,05. Sehingga kesimpulannya H3 ditolak. Hal ini dapat menggambarkan bahwa besarnya asimetri informasi tidak berdampak pada kecenderungan kecurangan.

### **Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan di Perguruan Tinggi Negeri di Kalbar**

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis keempat (H4) dapat dilihat bahwa Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada PTN di Kalbar dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya H4 diterima. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif, artinya semakin baik Kesesuaian Kompensasi maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai di PTN akan semakin menurun pula sehingga H4 diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2018).

Kesesuaian kompensasi pada pegawai keuangan di PTKIN masuk dalam kategori pemberian kompensasi yang sudah sesuai. Hal tersebut dikarenakan kompensasi keuangan

pegawai keuangan di PTKIN sudah sesuai dalam PP Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

### **Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Kecurangan di Perguruan Tinggi Negeri di Kalbar**

Keadilan Prosedural berkaitan dengan persepsi seseorang mengenai prosedur dalam pemberian gaji atau kompensasi lainnya kepada pegawai. Menurut Thibaut & Walker (1975) dalam Kadaruddin dkk (2012) keadilan prosedural mengacu pada kesetaraan prosedur.

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis kelima (H5) dapat dilihat bahwa Keadilan Prosedural tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05. Sehingga persepsi pegawai mengenai keadilan dalam pemberian kompensasi atas kinerjanya yang ada tidak dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada PTN di Kalbar.

### **Pengaruh Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan di Perguruan Tinggi Negeri di Kalbar**

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis keenam (H6) dapat dilihat bahwa Budaya Etis Manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai di PTN dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,091 lebih besar dari 0,05. Sehingga budaya etis manajemen yang ada tidak dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada PTN di Kalbar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) bahwa tidak terdapat pengaruh budaya etis manajemen terhadap kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintahan. Hal ini juga didukung dengan penelitian Apriadi (2013) yang menunjukkan budaya etis organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di instansi pemerintahan. Penelitian

Mustikasari (2013) juga menunjukkan bahwa budaya etis manajemen berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. karena kode etik yang dibuat didalam instansi tersebut belum mengandung nilai-nilai organisasi dan aturan etis yang sesuai sehingga belum dapat sepenuhnya dipatuhi oleh pegawai.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan di Perguruan Tinggi Negeri di Kalbar**

Menurut Kurniawan (2011) komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi.

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis ketujuh (H7) dapat dilihat bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,284 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat menekan terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh Chandra (2015) yang juga menemukan komitmen organisasi tidak terdapat pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar.
2. Keefektifan Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan

- kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar.
3. Asimetri Informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar.
  4. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar.
  5. Keadilan Prosedural tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar.
  6. Budaya Etis Manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar.
  7. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai PTN di Kalbar.

#### Saran

Saran yang didasarkan beberapa kesimpulan dan keterbatasan yang dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pimpinan PTN di Kalbar, diharapkan untuk memberikan sanksi yang lebih tegas untuk setiap pelanggaran peraturan oleh semua lapisan pegawai baik atasan maupun bawahan, juga meningkatkan keadilan mengenai kompensasi dengan memberikan bonus kepada pegawai yang kinerjanya baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah sampel/responden dalam penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albrecht, W. Steve Dkk. (2012), *Fraud Examination*. South-Western: Cengage Learning tersedia [online] : [http://books.google.co.id/books?id=SBzJYBsFPIC&pg=PA55&dq=fraud+triangle&hl=id&sa=X&ei=BdgxVNS9GMOPuASW6YBg&redir\\_esc=y#v=onepage&q=fraud%20triangle&f=false](http://books.google.co.id/books?id=SBzJYBsFPIC&pg=PA55&dq=fraud+triangle&hl=id&sa=X&ei=BdgxVNS9GMOPuASW6YBg&redir_esc=y#v=onepage&q=fraud%20triangle&f=false) di akses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 10.28 wib.
- [2] Anik Fatun Najahningrum. (2013). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Fraud*: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY". *Accounting Analysis Journal* Vol. 2 No. 3. ISSN 2252-6765.
- [3] Apriadi, Rangga Nuh, dkk. (2013). *Determinan Terjadinya Fraud di Institusi Pemerintahan*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- [4] Association of Certified *Fraud* Examiners. (2017), *Survei Fraud Indonesia 2016*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- [5] *Business Dictionary* (2018). *Pengertian Fraud*. Diakses [online] <http://www.businessdictionary.com/definition/fraud.html>
- [6] Chaplin, J.P. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi*. (Terjemahan: Kartono). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Chandra, Devia Prapnalina. (2015). *Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- [8] Crowe. (2011). *Putting The Freud in Fraud: Why the Triangle Is No Longer Enough*. In Howart: Crowe.
- [9] Denisova-Schmidt, E. (2017). *The Challenges of Academic Integrity in Higher Education: Current Trends and Prospects*.
- [10] Dhermawati Putri Mustikasari. (2013). *Persepsi Pegawai Dinas Se-Kabupaten Batang Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud)*. Skripsi. [online]. Diakses di <https://lib.unnes.ac.id/17634/1/7211409056.pdf> pada tanggal 24 April 2019, pukul 10.09 wib.
- [11] Heyneman, S. P., Anderson, K. H., & Nuraliyeva, N. (2007). *The cost of corruption in higher education*. *Comparative Education Review*, 52(1), 1-25.

- [12] Ika Ristianingsih. (2017). “Telaah Konsep *Fraud Diamond Theory* Dalam Mendeteksi Perilaku *Fraud* di Perguruan Tinggi.” Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis (SNAPER-EBIS 2017)- Jember, 27-28 Oktober 2017. Hal 127-139, ISBN: 978-602-5617-01-0.
- [13] Indonesia Corruption Watch. (2016), Korupsi di Perguruan Tinggi, tersedia [online] di: <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-di-perguruan-tinggi>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019, pukul 10.00 wib.
- [14] Jogiyanto, (2007), Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, Yogyakarta : BPFE.
- [15] Kadaruddin dkk. (2012). “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Keadilan Interaksional terhadap Kepuasan Pegawai Pajak Kota Makassar”
- [16] KBBI Daring, (2019), Definisi Persepsi, tersedia [online] di: <http://kbbi.web.id/persepsi.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 11.02 wib.
- [17] Kurniawan, Muhammad Rizki Nur. (2011).”Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi,dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik”,Skripsi.Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP
- [18] Maya Aresteria. (2018). “Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: *Literature Review*”. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vo. 6 No.1, Juli 2018, hal. 45-53. ISSN: 2548-9836.
- [19] Mustikasari, Dhermawati Putri. (2013). Presepsi pegawai dinas ke kabupaten Batang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fraud. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- [20] Najahningrum, Anik Fatun. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- [21] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Permerintah.
- [22] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- [23] Permatasari, Kurrohman, Kartika. (2018). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi pada Pegawai Keuangan Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.14, No. 1, Hal.37-44, Jakarta
- [24] Sihombing, Kennedy Samuel, & Shiddiq Nur Rahardjo. (2014). “Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement *Fraud*” : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Journal of Accounting Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- [25] Tampubolon, Robert. (2005), Risk and System-Based Internal Audit, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [26] Tessa, Chyntia G., Puji Harto.(2016)” *Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Sektor Keuangan Dan Perbankan Di Indonesia*” Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- [27] Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.
- [28] Umar, Husein, (2008), Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan, Jakarta: Rajawali Pers.
- [29] UNDP (2015). Pengertian Fraud. Diakses [online] <https://www.undp.org/content/dam/undp/documents/about/transparencydocs/UN>

[DP Anti-](#)

[fraud Policy English FINAL.pdf](#)

- [30] Wolf, David T dan Dana R Hermanson. (2004). The Fraud Diamond : Considering The Four Elements of *Fraud*. CPA Journal. 74. 12 : 38-42.
- [31] Yusof, Mohamed. K., Ahmad Khair A.H. and Jon Simon, et al. (2015). "Fraudulent Listed Companies". The Macrotheme Review 4(3), Spring.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN